

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur :

Atmasasmita, Romli. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, 2008. *Hukum Pajak (Edisi 4)*. Salemba Empat: Jakarta.

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing: Malang.

Danil, Elwi. 2012. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta : Rajawali Press.

Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir. 2006. *“Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata) cetakan ke-5”*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Hamzah, Andi . 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hanitjo Soemantoro, Ronny. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Banyumedia
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pahami Dulu Baru Lawan*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang :UMM Press.
- Makaraao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan &Penyidikan)*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud . 2005. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mulyadi, Lilik . 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni: Bandung.
- M. Hamzah, Chandra. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta.
- Nugroho, Hibnu. 2010. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Pangribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat Di Pengadilan)*. Papas Sinar Sinanti: Jakarta.
- Tresna, R.tt.. *Komentar HIR*. Jakarta :Pradnya Paramita.

## B. Jurnal

Dian dan Yowan, 2009. *Mimbar Hukum*, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Vol. 21

Nugroho, Hibnu. *Wajah Baru Praperadilan Indonesia*, Disampaikan pada acara In House Training, di Kejaksaan Negeri Cilacap, Selasa, 25 Agustus 2015 dengan tema “Kajian Normatif Permasalahan Praperadilan”.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol).

Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Putusan Praperadilan Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel

## D. Sumber Lain

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54db1a1869ef8/upaya-upaya-memperluas-objek-praperadilan> Diakses tanggal 7 Desember 2015 pukul 09.00 wib

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54dcc6be03248/chairul-huda--penetapan-tersangka-termasuk-objek-praperadilan> Diakses tanggal 8 Desember 2015 pukul 19.00 wib.

[http://soloraya.net/korupsi\\_-dan-pengertiannya.html](http://soloraya.net/korupsi_-dan-pengertiannya.html). Diakses tanggal 5 Januari 2016 Pukul 10.15 Wib.

<http://pantaukuhap.id/?p=1294> diakses tanggal 5 Januari 2016 pukul 10.30 wib.

<http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-korupsi-menurut-uu-tipikor.html> diakses tanggal 5 Januari 2016 pukul 22.00 wib

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana> Diakses tanggal 2 Februari 2016 pukul 20.15 wib.

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/951-diskusi-media-bahas-kewenangan-penindakan-di-kpk> Diakses tanggal 10 Februari 2016 Pukul 19.00 wib.

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2650-penetapan-tersangka-bisa-saat-penyelidikan> Diakses pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 10.00 wib.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b0a444f23252/UU+KPK> Diakses pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 09.00 wib.

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2650-penetapan-tersangka-bisa-saat-penyelidikan> Diakses pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 10.00 wib.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fc64409d9dc/pemberantasan-korupsi-di-sektor-perpajakan> Diakses pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 10.00 wib.